

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KARIMUN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, dimana kami telah dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, khususnya pasal 126 s.d 129, yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Menindaklanjuti peraturan tersebut maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun harus menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 sebagai perwujudan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun.

Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban formal atas semua pelaksanaan program ,kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja ini menyajikan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun sebelumnya (2021) yang berintikan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan capaian Renstra Perangkat Daerah , Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta Rencana Kerja serta pendanaan Perangkat daerah pada tahun 2023 yang akan datang.



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi-Nya, aamiin.

Tg. Balai Karimun, 9 Oktober 2022



**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN**

Ir. H. RUFFINDY ALAMSJAH, M.App. Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19671003 199203 1 010



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	28
2.4 Riviui Terhadap Rancangan Awak RKPD	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	45
3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional	45
3.2 Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karimun dalam RKPD Tahun 2023	47
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	48
3.4 Program dan Kegiatan	50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	53
BAB V PENUTUP	66

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan tahun 2022	11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun 2021-2026	27
Tabel 2.3	Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023	30
Tabel 3.1	Prioritas Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2023 Urusan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	47
Tabel 4.1	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimu	54



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Agar pembangunan daerah lebih terarah dan terukur maka diperlukan perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat

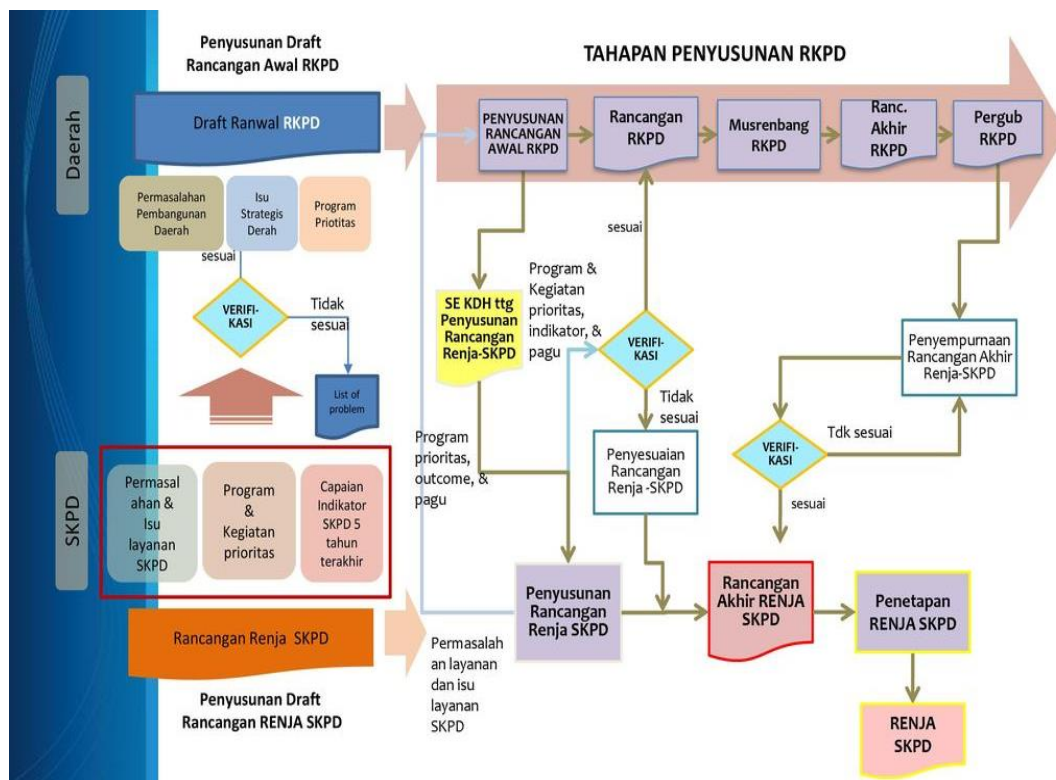


Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari persiapan penyusunan Renja, penyusunan Rancangan Renja, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang penyusunan RKPD, penyusunan Rancangan Akhir Renja, dan penetapan Renja. Penyusunan Renja harus berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Tahapan penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1 Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

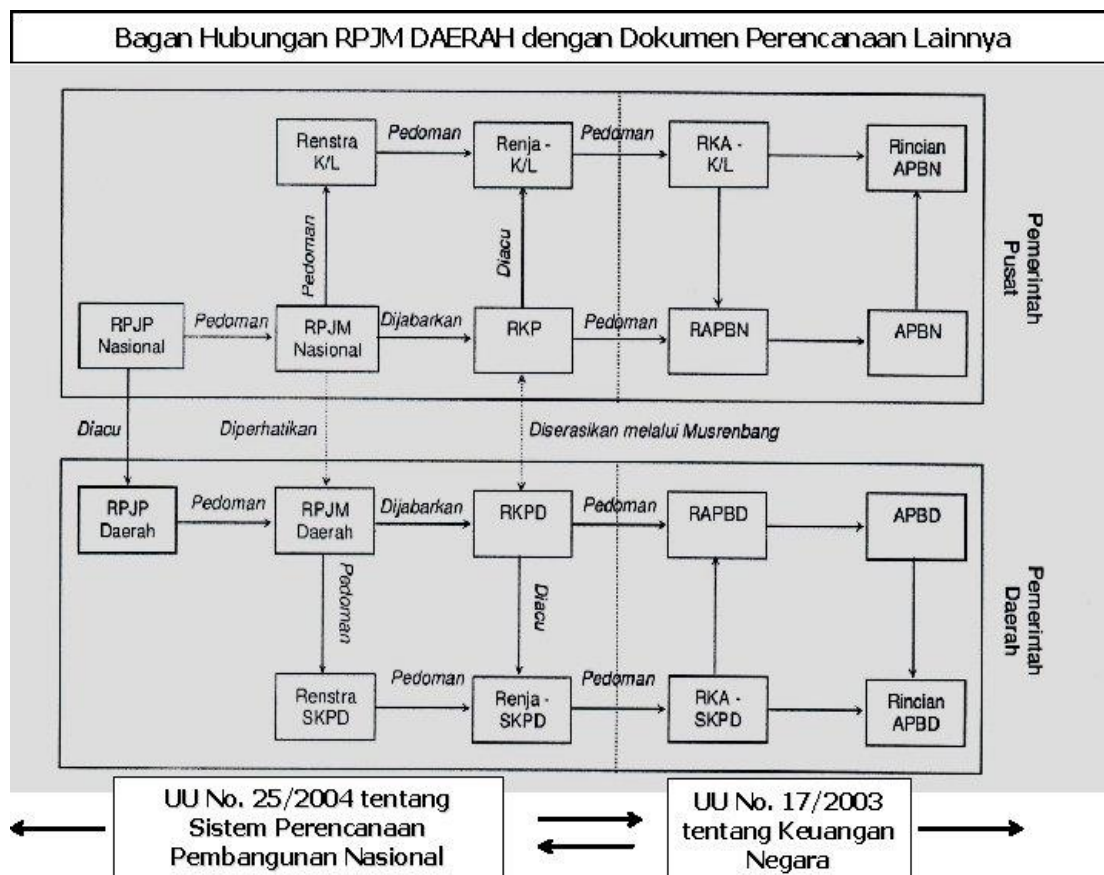


1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam Menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan

dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam Menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



1.2 Landasan Hukum

1.2.1 Ketentuan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, dan kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :



- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
- d. Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 64).

1.2.2 Ketentuan Tentang Perencanaan Penganggaran

Ketentuan Tentang Perencanaan Penganggaran adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Investarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



- j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);

1.2.3 Ketentuan Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Lainnya Terkait Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian :

Ketentuan Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Lainnya Terkait Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).



1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun adalah untuk memberikan gambaran program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, yang disusun berpedoman kepada Renstra dan RKPD.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2023 adalah untuk menyingkronkan dan menyinergikan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Memuat latar belakang, yaitu pengertian Renja Perangkat Daerah. proses penyusunan Renja, keterkaitan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya;
- 1.2 Landasan hukum;
- 1.3 Maksud dan tujuan dan;
- 1.4 Sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021



- 2.1 Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan capaian Renstra;
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun;
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun;
- 2.4 Review terhadap awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN

- 3.1 Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional;
- 3.2 Tema, Tujuan, Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karimun dalam RKPD Tahun 2023;
- 3.3 Program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN

Memuat rencana kerja dan pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun

BAB V PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun untuk tahun anggaran 2021 telah mendapat alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Karimun sebesar Rp. 9.419,998,387,- untuk melaksanakan 5 (Lima) Program dan 11 Kegiatan dan setelah APBDP anggaran menjadi Rp. 4.418,352,697,- Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 4.212.895.487,- atau 95,35 Persen. Berikut ini disajikan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun :



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Tabel 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN S.D TAHUN 2022 KABUPATEN KARIMUN

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Progam dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah Tahun n- 1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun (n- 2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n- 1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	75	75	75	100	75	75	100
2	7	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen / 5 Laporan	9 Dokumen / 2 Laporan	4 Dokumen / 2 Laporan	2 Dokumen / 2 Laporan	50 / 100	2 Dokumen / 5 Laporan	2 Dok / 3 Lap	100 / 60
2	7	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen (Renja, Renja RB)	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen (Renja, Renstra)	100	2 Dokumen (Renja, Renja RB)	1 Dokumen	50
2	7	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Lap (Lapkin, PK, Real PK)	5 Laporan	2 Laporan	3 Lap (Lapkin, PK, Real PK)	150	3 Lap (Lapkin, Pk, Real PK)	3 Lap (Lapkin, PK, Real PK)	100



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

2	7	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap (Evaluasi Renja, Evaluasi RB)	-	-	-	-	2 Lap (Evaluasi Renja, Evaluasi RB)	-	-
2	7	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Keuangan	3 Dok / 3 Lap	1 Dok / 1 Lap	1 Dok / 1 Lap	1 Dok / 1 Lap	100	1 Dok / 1 Lap	1 Dok / 1 Lap	100
2	7	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	312 orang/bulan (26 Orng x 14 Bulan)	300	300	300	100	312 orang/bulan (26 Orng x 14 Bulan)	312	100
2	7	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	7	1	2,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0
2	7	1	2,02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0
2	7	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	0	0	0	0	0	0
5	1	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	0	0	0	0	2 Laporan (Laporan Keuanagn Tahunan, Laporan Keuangan Triwulan)	0	0



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

5	1	1	2,02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0
5	1	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan hasil Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0	0	2 Laporan	0	0
5	1	1	2,03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan (Lap Rekonsiliasi, Lap Asset OPD)	2 Laporan	2 Laporan	0	0	2 Laporan (Lap Rekonsiliasi, Lap Asset OPD)	0	0
2	7	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Laporan	0	0	0	0	3 Laporan	0	0
2	7	1	2,05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	0	0	0	0	0	0	0
2	7	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	0	0	0	1 Paket	0	0
2	7	1	2,05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	0	0
2	7	1	2,05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0
2	7	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0	0	0	0	3 Orang	0	0
2	7	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan			8 Laporan		



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

2	7	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
2	7	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
2	7	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
2	7	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
2	7	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
2	7	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	7	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100	15 Laporan	15 Laporan	100
2	7	1	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	0	0
2	7	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	8 Laporan	0	0	0	0	2 Laporan	1 Laporan	100
2	7	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

2	7	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	0	0
2	7	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0	0	0	0	5 Unit	5 Unit	100
2	7	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	0	0	0	4 Unit	0	0
2	7	1	2,07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	0	0
2	7	1	2,07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	0	0
2	7	1	2,07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	0	0
2	7	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	0	0
2	7	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	0	0
2	7	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	4 Laporan		
2	7	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0	0	2 Laporan	0	0
2	7	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

2	7	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100
2	7	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100
2	7	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100
2	7	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	100	2 Unit	1 Unit	100
2	7	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	2 Unit	100
2	7	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100	10 Unit	10 Unit	100
2	7	1	2,09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0	0	0	0	0	0	0
2	7	1	2,09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	0	0	0	0	0	0	0
2	7	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	0	0	0	0	0	0



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

2	7	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	0	0	0	0	0	0
2	7	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	0	0	0	0	0	0
2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Kesempatan Kerja	94,55%	91,63%	92,25%	0	0	93,31%	0	0
2	7	2	2,01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Kab Karimun yang disusun	0	0	0	0	0	2 Dokumen	0	0
2	7	2	2,01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0	0	0	0	0	1 Dokumen	0	0
2	7	2	2,01	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	0	0	0	0	0	20 Perusahaan	0	0
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	56,45%	55,79%	55,79%	23,98%	42,98%	56,45%	50,25%	89,01%
2	7	3	2,01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	30%	Na (Pandemi Covid 19)	30%	3,60%	12%	30%	30%	100%
2	7	3	2,01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	620 Orang	Na (Pandemi Covid 19)	439 Orang	17 Orang	3,87 %	550 Orang	550 Orang	100%



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

2	7	3	2,01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	4 Lembaga	0	0	0	0	4 Lembaga	0	0
2	7	3	2,01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	5 Unit	0	0	0	0	5 Unit	0	0
2	7	3	2,02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang terakreditasi	1 LPK	0	0	0	0	1 LPK	0	0
2	7	3	2,02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	1 LPK	0	0	0	0	1 LPK	0	0
2	7	3	2,04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Laporan Produktivitas perusahaan kecil	1 Laporan	Na	Na	0	0	1 Laporan	0	0
2	7	3	2,04	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	0	0	0	0	10 Perusahaan	0	0
2	7	3	2,05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	7	3	2,05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	46,50%	44,66%	44,66%	91,22%	48,95%	45,15%	45,45%	100
						Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA)	2,1 m	1,6 m	2 m	1,5 m	75	2 m	1,5	75



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

2	7	4	201		Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelayanan Antar Kerja	1 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	0	0
2	7	4	201	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain lain untuk Peningkatan Kompetensi	2 Orang	0	0	0	0	2 Orang	0	0
2	7	4	201	2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	250 Orang	0	0	0	0	250 Orang	0	0
2	7	4	201	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	20 Orang	0	0	0	0	20 Orang	0	0
2	7	4	201	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	2 Orang	0	0	0	0	2 Orang	0	0
2	7	4	201	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	0	0	0	0	20 Orang	0	0
2	7	4	2,03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah perusahaan yang mempublikasikan kesempatan kerja	5 Perusahaan	7 Perusahaan	9 Perusahaan	20 Perusahaan	222%	5 Perusahaan	5 Perusahaan	100
2	7	4	2,03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	7	4	2,03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Laporan Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1 Laporan	0	0	0	0	1 Laporan	0	0



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

2	7	4	203	3	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Laporan Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	1 Laporan	0	0	0	0	1 Laporan	0	0
2	7	4	2,05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA	111 Orang	111 Orang	111 Orang	111 Orang	100	111 Orang	111 Orang	100
2	7	4	2,05	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	1 Laporan	0	0	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penyelesaian kasus yang difasilitasi	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	6 Kasus	83,33	5 Kasus		
2	7	5	2,01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP	24 Perusahaan	18 Perusahaan	20 Perusahaan	31 Perusahaan	64,51	22 Perusahaan	22 Perusahaan	100
						Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB	4 Perusahaan	4 Perusahaan	4 Perusahaan	4 Perusahaan	100	4 Perusahaan	4 Perusahaan	100
	7	5	2,01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	31 Perusahaan	31 Perusahaan	31 Perusahaan	0	0	31 Perusahaan	0	0
	7	5	2,01	2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	4 Perusahaan	4 Perusahaan	4 Perusahaan	0	0	4 Perusahaan	0	0



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

2	7	5	2,01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
2	7	5	2,02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	25	4 Laporan	1 Laporan	25
2	7	5	2,02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	7 Perkara	7 Perkara	7 Perkara	0	0	7 Perkara	0	0
2	7	5	2,02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	7 Perkara	7 Perkara	7 Perkara	0	0	7 Perkara	0	0



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

2	7	5	2,02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	2 Asosiasi / 8 SP-SB	0	2 Asosiasi / 8 SP-SB	0	0	2 Asosiasi / 8 SP-SB	0	0
2	7	5	2,02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100	1 Lembaga	1 Lembaga	100
2	7	5	2,02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	50 Orang	0	0	0	0	50 Orang	0	0
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	77,15%	48,15%	59,65%			69,65%		
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	6 Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	100	6 Dokumen	3 Dokumen	50
31	31	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

3	31	2	2,01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	0	0
3	31	2	2,01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	0	0
3	31	2	2,01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	0	0
3	31	2	2,01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0	0
3	31	2	2,01	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0	0
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	44%	12%	16,60%	0	0	26,60%	0	0



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

3	3 1	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	0	0
3	31	3	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	0	0
3	31	3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	0	0



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Dokumen Informasi industri secara lengkap dan terkini	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	0	0
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	0	0	0	0	3 Dokumen	0	0
3	31	4	2.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	0	0
3	31	4	2.01	2	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	0	0
3	31	4	2.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	0	0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja merupakan dasar dalam mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun telah dapat terlaksana dengan baik dengan tingkat capaian dan berhasil hal ini ditandai dari 3 (tiga) sasaran dinyatakan sangat baik dan 1 (satu) sasaran dengan indikator tingkat pertumbuhan wirausaha baru nilai capaiannya adalah 8,6% hal ini dikarenakan dampak dari pandemic covid 19.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini:



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi	Capaian	Proyeksi	
					2021	2022	2023			2022	2023
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen			61,22			60,86	99,41		
2	Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal	Persen			3,9 (50,50)			50,42	99,84		
3	Tingkat Pertumbuhan Wirasusahabaru	Persen			15			1,29	8,6		
4	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja yang berkompeten	Persen			16,2			23,98	148,02		
5	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)	Persen			32			32	100		
6	Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen			35,70			55,04	154,17		
7	Rasio Pelaku Usaha (IKM) terhadap jumlah penduduk					0,66	0,66			0,66	0,66
8	Nilai Akip					73	73			73	73
9	Tingkat Kesempatan Kerja					93,31	94,55			93,31	94,55
10	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi					56,45	56,45			56,45	56,45
11	Penyelesaian Kasus yang Difasilitasi					5	5			5	5
12	Retribusi IMTA					2 (m) Rupiah	2,1 (m) Rupiah			2 (m) Rupiah	2,1 (m) Rupiah
13	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan					45,15	46,50			45,15	46,50
14	Indeks Kepuasan Masyarakat					80	80			80	80
15	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin					69,65	77,15			69,65	77,15
16	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait					26,6	44			26,6	44
17	Dokumen Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini					1	1			1	1

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2022 sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja dan perindustrian yang akan dilaksanakan dengan baik, dan mudah-mudahan pelaksanaan program dan kegiatan tidak banyak terkendala dan dibatalkan pelaksanaan kegiatan utamanya sehingga berakibat capaian kegiatan dan program dapat tercapai.

Salah satu isu yang sangat penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 yang lalu adalah munculnya wabah Covid- 19 yang sampai sekarang masih berlanjut. Sebagai akibat adanya wabah Covid-19 yang dianggap sebagai bencana yang tak terduga (*Force majeure*), di seluruh wilayah Indonesia.

Pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian refocussing anggaran telah menyebabkan beberapa program dan kegiatan harus disesuaikan lagi dengan kebutuhan dana yang mendesak dalam penanggulangan wabah covid-19 tersebut. Pergeseran program dan kegiatan yang terjadi pada tahun 2021 antara lain adalah kegiatan :

1. Urusan Ketenagakerjaan :

- Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi : Kegiatan ini tidak terlaksana karena adanya kebijakan anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

2. Urusan Perindustrian

- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota : Keutamaan kegiatan ini yakni Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat untuk menambah pendapatan Industri Kecil dan Menengah serta untuk masyarakat tidak terlaksana karena kebijakan anggaran terkait covid-19.

Permasalahan utama (Strategic Issued) yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan dan Perindustrian Pada Tahun 2021 antara lain adalah :



1. Urusan Ketenagakerjaan

- a) Lapangan Kerja yang semakin Berkurang Kondisi lingkungan kerja terutama menurunnya daya tampung dan atau serapan tenaga kerja terhadap tingginya angkatan kerja yang ada sepanjang tahun 2021 hal ini dampak dari pandemi covid 19.
- b) Masih rendahnya kualitas tenaga kerja atau pencari kerja yang ada, sehingga membutuhkan banyak pelatihan-pelatihan yang bersertifikasi untuk diikuti oleh calon tenaga kerja yang ada pada tahun 2021.

2. Urusan Perindustrian

- a) Terbatasnya sarana dan prasarana produksi dibidang Perindustrian terutama terjadi pada IKM sehingga tidak dapat memberikan output yang maksimal.

2.4 Riviui Terhadap Rancangan Awal RPKD

Penyusunan Renja awal Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2023 sejalan dengan Rancangan Awal RPKD Kabupaten Karimun Tahun 2023, yang telah dituangkan secara rinci dan jelas dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun. Bilamana dalam proses perkembangannya terjadi perubahan dalam RPKD baik berupa prioritas, isu strategis maupun kemampuan keuangan yang tidak sesuai lagi dengan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustriani Tahun 2023 maka RPKD Kabupaten Karimun Tahun 2023 tetap menjadi pedoman utama, seperti dapat dilihat pada table 2.3 di bawah ini :



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Tabel 2.3 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.720.500.000	
2	7				URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA				11.720.500.000	
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		75,00	4.490.950.000	-
2	7	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		7 Dokumen	100.000.000	
2	7	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Karimun	2 Dokumen - Renja - Renja RB	41.500.000	APBD
2	7	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Karimun	3 Dok - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	31.500.000	APBD
2	7	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Karimun	2 Dokumen - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	27.000.000	APBD
2	7	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Keuangan	-	3 Dok / 3 Lap	3.568.000.000	



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

2	7	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Karimun	312 orang bulan (26 orang x 12 bulan)	3,443,000,000	APBD
2	7	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	30.000.000	APBD
2	7	1	2,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	20.000.000	APBD
2	7	1	2,02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	20.000.000	APBD
2	7	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	15.000.000	APBD
5	1	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Karimun	2 Laporan (- Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan Triwulanan)	25.000.000	APBD
5	1	1	2,02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	15.000.000	APBD



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

5	1	1	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan		2 Laporan	15.000.000	
5	1	1	2,03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Karimun	2 Laporan (- Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD)	15.000.000	APBD
2	7	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Karimun	2 Laporan	65.000.000	
2	7	1	2,05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kabupaten Karimun	2 Unit	5.000.000	APBD
2	7	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Karimun	1 Paket	20.000.000	APBD
2	7	1	2,05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	15.000.000	APBD
2	7	1	2,05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	5.000.000	APBD
2	7	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Karimun	3 Orang	20.000.000	APBD
2	7	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adm Umum	-	8 Laporan	132.150.000	
2	7	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Paket	2.500.000	APBD



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

2	7	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Paket	14.000.000	APBD
2	7	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Paket	7.000.000	APBD
2	7	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Paket	7.500.000	APBD
2	7	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Paket	7.750.000	APBD
2	7	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	15.400.000	APBD
2	7	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Karimun	15 Laporan	44.000.000	APBD
2	7	1	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	34.000.000	APBD
2	7	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pengadaan Barang	-	0	20.000.000	
2	7	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Unit	3.000.000	APBD
2	7	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Karimun	2 Unit	3.000.000	APBD



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

2	7	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Karimun	2 Unit	3.000.000	APBD
2	7	1	2,07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Unit	2.000.000	APBD
2	7	1	2,07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Unit	2.000.000	APBD
2	7	1	2,07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Unit	2.000.000	APBD
2	7	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Unit	2.000.000	APBD
2	7	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Unit	3.000.000	APBD
2	7	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4 Laporan	543.000.000	
2	7	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Karimun	2 Laporan	1.500.000	APBD
2	7	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Karimun	3 Laporan	18.500.000	APBD



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

2	7	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	2 Laporan	11.000.000	APBD
2	7	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	3 Laporan	512.000.000	APBD
2	7	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	8 Laporan	47.800.000	
2	7	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Karimun	2 Unit	13.800.000	APBD
2	7	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Karimun	2 Unit	5.000.000	APBD
2	7	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Karimun	10 Unit	5.000.000	APBD
2	7	1	2,09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Karimun	1 Unit	4.000.000	
2	7	1	2,09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kabupaten Karimun	1 Unit	5.000.000	



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

2	7	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Karimun	1 Unit	5.000.000	
2	7	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Karimun	1 Unit	5.000.000	
2	7	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Karimun	1 Unit	5.000.000	
2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Kesempatan Kerja		94,55%		
2	7	2	2,01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Kab Karimun yang disusun				
2	7	2	2,01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				
2	7	2	2,01	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro				
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		56,45%	5.669.550.000	
2	7	3	2,01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	-	30%	5.404.550.000	



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

2	7	3	2,01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kabupaten Karimun	620 Orang	5.219.550.000	APBD
2	7	3	2,01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Kabupaten Karimun	4 Lembaga	85.000.000	APBD
2	7	3	2,01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kabupaten Karimun	5 Unit	100.000.000	APBD
2	7	3	2,02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang terakreditasi	-	1 LPK	130.000.000	
2	7	3	2,02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kabupaten Karimun	1 LPK	130.000.000	APBD
2	7	3	2,04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Laporan Produktivitas perusahaan kecil		1 Laporan	75.000.000	
2	7	3	2,04	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kabupaten Karimun	10 Perusahaan	75.000.000	APBD
2	7	3	2,05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	-	1 Dokumen	60.000.000	
2	7	3	2,05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	60.000.000	APBD



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	-	46,50%	830.000.000	
						Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA)	-	2,1 m	110.000.000	
2	07	04	201		Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelayanan Antar Kerja	-	1 Dokumen	470.000.000	
2	07	04	201	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain lain untuk Peningkatan Kompetensi	Kabupaten Karimun	2 Orang	50.000.000	APBD
2	07	04	201	2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kabupaten Karimun	250 Orang	100.000.000	APBD
2	07	04	201	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kabupaten Karimun	20 Orang	95.000.000	APBD
2	07	04	201	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Kabupaten Karimun	2 Orang	75.000.000	APBD
2	07	04	201	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kabupaten Karimun	20 Orang	150.000.000	APBD
2	7	4	2,03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah perusahaan yang mempublikasikan kesempatan kerja	-	5 Perusahaan	360.000.000	



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

2	7	4	2,03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	120.000.000	APBD
2	7	4	2,03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Laporan Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kabupaten Karimun	1 Laporan	120.000.000	APBD
2	07	04	203	3	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Laporan Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Kabupaten Karimun	1 Laporan	120.000.000	APBD
2	7	4	2,05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA	-	111 Orang	110.000.000	
2	7	4	2,05	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	110.000.000	APBD
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penyelesaian kasus yang difasilitasi		5 Kasus	620.000.000	
2	7	5	2,01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP		24 Perusahaan	100.000.000	
						Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB		5 Perusahaan	135.000.000	
	7	5	2,01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait	Kabupaten Karimun	31 Perusahaan	50.000.000	APBD



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

						dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				
	7	5	2,01	2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kabupaten Karimun	4 Perusahaan	50.000.000	APBD
2	7	5	2,01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	135.000.000	APBD
2	7	5	2,02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	-	3 Laporan	385.000.000	
2	7	5	2,02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kabupaten Karimun	7 Perkara	65.000.000	APBD
2	7	5	2,02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kabupaten Karimun	7 Perkara	65.000.000	APBD



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

2	7	5	2,02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kabupaten Karimun	2 Asosiasi / 8 SP-SB	65.000.000	APBD
2	7	5	2,02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kabupaten Karimun	1 Lembaga	130.000.000	APBD
2	7	5	2,02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kabupaten Karimun	50 Orang	60.000.000	APBD
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.640.000.000	
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	-	77,15%	1.270.000.000	
3	31	2	2,01		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	-	1 Dokumen	1.270.000.000	
31	31	2	2,01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	75.000.000	APBD
3	31	2	2,01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan,	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50.000.000	APBD



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

					Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				
3	31	2	2,01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50.000.000	APBD
3	31	2	2,01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50.000.000	APBD
3	31	2	2,01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	975.000.000	APBD
3	31	2	2,01	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	70.000.000	APBD
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	44%	100.000.000	



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

3	31	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	-	1 Laporan	100.000.000	
3	31	3	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50.000.000	APBD
3	31	3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50.000.000	APBD
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dokumen Informasi industri secara lengkap dan terkini	-	1 Dokumen	270.000.000	



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	3 Dokumen	270.000.000	
3	31	4	2.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50.000.000	APBD
3	31	4	2.01	2	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	60.000.000	APBD
3	31	4	2.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	160.000.000	APBD
					TOTAL KESELURUHAN				13.360.500.000	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, visi pembangunan nasional adalah **"Indonesia yang mandiri, adil dan makmur"**. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah menetapkan 8 (delapan) misi, yaitu:

- 1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
- 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- 3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
- 4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
- 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
- 6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
- 7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-sebelumnya.

Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMN secara ringkas adalah sebagai berikut:

- 1) RPJMN ke-1 (2005–2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.



- 2) RPJMN ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.
- 3) RPJMN ke-3 (2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.
- 4) RPJMN ke-4 (2020–2024) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Oleh karena itu, tema RPJM 2020-2024 adalah "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan" yang dituangkan ke dalam 7 misi atau agenda pembangunan. Ketujuh agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengiirangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing;
4. Membangun Kebudayaan Dan Karakter Bangsa;
5. Memperkuat Inirastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan Dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.



3.2. Tema, Tujuan, Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karimun dalam RKPD Tahun 2023

Pada Ranwal RKPD visi pembangunan Kabupaten Karimun tahun 2023 adalah "Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa". Adapun tema yang diambil adalah "Peningkatan Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Sumber Daya Manusia yang Unggul" Prioritas pembangunan dalam Ranwal RKPD tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2023 Urusan Dinas Tenaga Kerja dan Peindustrian

PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS	PROGRAM	URAIAN
Peningkatan Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkeadilan	1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
	Meningkatkan Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		



	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Program Perencanaan Tenaga Kerja 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 3. Program Penempatan Tenaga Kerja 4. Program Hubungan Industrial	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
--	---	--	--

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Seperti halnya tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026, maka penyusunan Dokumen Rencana Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun tetap mengacu kepada tujuan dan sasaran yang termuat di dalam dokumen Renstra dimaksud, sebagaimana dapat dijelaskan dibawah ini :

1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Strategis merupakan penjabaran implementasi dari misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun . secara rinci tujuan yang ditetapkan selama kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Misi 3 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa (Berkeadilan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia).							
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
A.	Urusan Ketenagakerjaan						
1.	Mendorong perluasan dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja di daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	8%	7,60%	7,10%	6,60%	6%
B.	Urusan Perindustrian						
2.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB Perkapita	62,74 Juta (Rp)	65,94 Juta (Rp)	69,32 Juta (Rp)	72,86 Juta (Rp)	76,59 Juta (Rp)

Misi 5 : Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional dan Unggul (Bekeadilan Dalam Pelayanan Publik)							
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3.01	3.50	3.51	3.55	4.00

2. Sasaran Perangkat Daerah

Selanjutnya tujuan strategis tersebut diuraikan menjadi beberapa sasaran dan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti yang diuraikan pada tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
A.	Ketenagakerjaan						
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal Yang Kompetitif	1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	61,21%	62,45%	63,71%	64,17%	65,27%



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

		2) Rasio tenaga kerja lokal terhadap seluruh tenaga kerja	91,45%	91,50%	91,55%	91,60%	91,65%
B.	Perindustrian						
2.	Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	Rasio Pelaku Usaha (IKM) terhadap jumlah penduduk	0,66%	0,66%	0,66%	0,67%	0,67%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin	Nilai Akip	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00

3.4 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2023 yang akan dicapai sesuai dengan target yakni :

Tabel 3.2 Program dan Kegiatan

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Program	Kegiatan
Urusan Ketenagakerjaan				
Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal Yang Kompetitif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	62,45%	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
	Rasio tenaga kerja lokal terhadap seluruh tenaga kerja	91,50%	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 2. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

				hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan 3. Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1. Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 3. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Urusan Perindustrian				
Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	Rasio Pelaku Usaha (IKM) terhadap jumlah penduduk	0,66%	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

				Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin	Nilai Akip	73 Nilai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun anggaran 2023 dan sekaligus merupakan referensi bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun ini berisikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaannya serta kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rancangan Awal Rencana Kerja tahun 2023 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen yang pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun baik sekretariat maupun bidang – bidang, demi mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan rapat koordinasi dan observasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahap berikutnya.

Adapun Rancangan Awal Rencana Kerja berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan, output, outcome, pagu indikatif dan sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.1 tentang Rencana Kerja Program, kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini :



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.720.600.000				11.555.907.000
2	7				URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA				11.720.600.000				11.555.907.000
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		56,45%	5.669.550.000			57,23%	5.231.202.000
2	7	3	2,01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		30%	5.404.550.000			30%	4.951.202.000
2	7	3	2,01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	kab Karimun	620 Orang	5.219.550.000	APBD / APBN		560 Orang	4.766.202.000
2	7	3	2,01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan /Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	kab Karimun	4 Lembaga	85.000.000	APBD		0	-
2	7	3	2,01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	kab Karimun	5 Unit	100.000.000	APBD		4 Unit	185.000.000
2	7	3	2,02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang terakreditasi		1 LPK	130.000.000			1 LPK	135.000.000
2	7	3	2,02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	kab Karimun	1 LPK	130.000.000	APBD		1 LPK	135.000.000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

2	7	3	2,04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Laporan Produktivitas perusahaan kecil		1 Laporan	75.000.000			1 Laporan	80.000.000
2	7	3	2,04	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	kab Karimun	10 Perusahaan	75.000.000	APBD		10 Perusahaan	80.000.000
2	7	3	2,05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah		1 Dokumen	60.000.000			1 Dokumen	65.000.000
2	7	3	2,05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	kab Karimun	1 Dokumen	60.000.000	APBD		1 Dokumen	65.000.000
2	07	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan		46,50%	830.000.000			46,75%	925.000.000
						Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA)		2,1 m	110.000.000			2,1 m	110.000.000
2	07	04	201		Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelayanan Antar Kerja		1 Dokumen	470.000.000			1 Dokumen	565.000.000
2	07	04	201	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain lain untuk Peningkatan Kompetensi	kab Karimun	2 Orang	50.000.000	APBD		2 Orang	75.000.000
2	07	04	201	2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	kab Karimun	250 Orang	100.000.000	APBD		250 Orang	100.000.000
2	07	04	201	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	kab Karimun	20 Orang	95.000.000	APBD		20 Orang	105.000.000
2	07	04	201	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	kab Karimun	2 Orang	75.000.000	APBD		2 Orang	80.000.000
2	07	04	201	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	kab Karimun	20 Orang	150.000.000	APBD		20 Orang	205.000.000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

2	7	4	2,03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah perusahaan yang mempublikasikan kesempatan kerja		5 Perusahaan	360.000.000			5 Perusahaan	360.000.000
2	7	4	2,03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	kab Karimun	1 Dokumen	120.000.000	APBD		1 Dokumen	120.000.000
2	7	4	2,03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Laporan Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	kab Karimun	1 Laporan	120.000.000	APBD		1 Laporan	120.000.000
2	07	04	203	3	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Laporan Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	kab Karimun	1 Laporan	120.000.000	APBD		1 Laporan	120.000.000
2	7	4	2,05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA		111 Orang	110.000.000			111 Orang	110.000.000
2	7	4	2,05	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	kab Karimun	1 Laporan	110.000.000	APBD		1 Laporan	110.000.000
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penyelesaian kasus yang difasilitasi		5 Kasus	620.000.000			6 Kasus	760.000.000
2	7	5	2,01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP		24 Perusahaan	100.000.000			26 Perusahaan	110.000.000
						Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB		4 Perusahaan	135.000.000			4 Perusahaan	140.000.000
	7	5	2,01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	kab Karimun	31 Perusahaan	50.000.000	APBD		33 Perusahaan	55.000.000
	7	5	2,01	2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	kab Karimun	4 Perusahaan	50.000.000	APBD		4 Perusahaan	55.000.000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

2	7	5	2,01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	kab Karimun	1 Laporan	135.000.000	APBD		1 Laporan	140.000.000
2	7	5	2,02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		3 Laporan	385.000.000			4 Laporan	510.000.000
2	7	5	2,02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	kab Karimun	7 Perkara	65.000.000	APBD		7 Perkara	90.000.000
2	7	5	2,02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	kab Karimun	7 Perkara	65.000.000	APBD		7 Perkara	90.000.000
2	7	5	2,02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	kab Karimun	2 Asosiasi / 8 SP-SB	65.000.000	APBD		2 Asosiasi / 8 SP-SB	90.000.000
2	7	5	2,02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	kab Karimun	1 Lembaga	130.000.000	APBD		1 Lembaga	130.000.000
2	7	5	2,02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	kab Karimun	50 Orang	60.000.000	APBD		50 Orang	110.000.000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.640.000.000				1.875.000.000
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin		77,15%	1.270.000.000			82,15%	1.495.000.000
3	31	2	2,01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Industri		6 Dokumen	1.270.000.000			6 Dokumen	1.495.000.000
31	31	2	2,01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	kab Karimun	1 Dokumen	75.000.000	APBD		1 Dokumen	60.000.000
3	31	2	2,01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	kab Karimun	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
3	31	2	2,01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	kab Karimun	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
3	31	2	2,01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	kab Karimun	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
3	31	2	2,01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	kab Karimun	1 Dokumen	975.000.000	APBD		1 Dokumen	1.215.000.000
3	31	2	2,01	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	kab Karimun	1 Dokumen	70.000.000	APBD		1 Dokumen	70.000.000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		44%	100.000.000			52%	120.000.000
3	31	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		1 Dokumen	100.000.000			1 Dokumen	120.000.000
3	31	3	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	kab Karimun	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	60.000.000
3	31	3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	kab Karimun	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	60.000.000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Dokumen Informasi industri secara lengkap dan terkini		1 Dokumen	270.000.000			1 Dokumen	260.000.000
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		3 Dokumen	270.000.000			3 Dokumen	260.000.000
3	31	4	2.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	kab Karimun	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
3	31	4	2.01	2	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	kab Karimun	1 Dokumen	60.000.000	APBD		1 Dokumen	60.000.000
3	31	4	2.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	kab Karimun	1 Dokumen	160.000.000	APBD		1 Dokumen	150.000.000
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		75,00	4.490.950.000			75,00	4.529.705.000
2	7	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Dokumen / 5 Laporan	100.000.000				131.500.000
2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	kab Karimun	2 Dokumen - Renja - Renja RB	41.500.000	APBD		2 Dokumen - Renja - Renja RB	52.000.000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

2	7	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kab Karimun	3 Lap - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	31.500.000	APBD		3 Lap - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	51.500.000
2	7	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kab Karimun	2 Lap - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	27.000.000	APBD		2 Lap - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	28.000.000
2	7	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Keuangan		3 Dok / 3 Lap	3.568.000.000			3 Dok / 3 Lap	3.570.000.000
2	7	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	kab Karimun	312 orang bulan (26 orang x 14 bulan)	3.443.000.000	APBD		324 orang bulan (27 orang x 14 bulan)	3.445.000.000
2	7	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	kab Karimun	1 Dokumen	30.000.000	APBD		1 Dokumen	30.000.000
2	7	1	2,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	kab Karimun	1 Dokumen	20.000.000	APBD		1 Dokumen	20.000.000
2	7	1	2,02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	kab Karimun	1 Dokumen	20.000.000	APBD		1 Dokumen	20.000.000
2	7	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	kab Karimun	1 Laporan	15.000.000	APBD		1 Laporan	15.000.000
5	1	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	kab Karimun	2 Laporan	25.000.000	APBD		2 Laporan	25.000.000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

5	1	1	2,02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	kab Karimun	1 Dokumen	15.000.000	APBD		1 Dokumen	15.000.000
5	1	1	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan hasil Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan	15.000.000			2 Laporan	15.000.000
5	1	1	2,03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	kab Karimun	2 Laporan (- Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD)	15.000.000	APBD		2 Laporan (- Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD)	15.000.000
2	7	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2 Laporan	65.000.000			2 Laporan	45.000.000
2	7	1	2,05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	kab Karimun	2 Unit	5.000.000	APBD		2 Unit	5.000.000
2	7	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	kab Karimun	1 Paket	20.000.000	APBD		0	-
2	7	1	2,05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	kab Karimun	1 Dokumen	15.000.000	APBD		1 Dokumen	15.000.000
2	7	1	2,05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	kab Karimun	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	5.000.000
2	7	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	kab Karimun	3 Orang	20.000.000	APBD		3 Orang	20.000.000
2	7	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		8 Laporan	132.150.000			8 Laporan	132.400.000
2	7	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	kab Karimun	1 Paket	2.500.000	APBD		1 Paket	2.600.000
2	7	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	kab Karimun	1 Paket	14.000.000	APBD		1 Paket	14.000.000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

2	7	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	kab Karimun	1 Paket	7.000.000	APBD		1 Paket	7.000.000
2	7	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	kab Karimun	1 Paket	7.500.000	APBD		1 Paket	7.600.000
2	7	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	kab Karimun	1 Paket	7.750.000	APBD		1 Paket	7.800.000
2	7	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	kab Karimun	1 Dokumen	15.400.000	APBD		1 Dokumen	15.400.000
2	7	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kab Karimun	15 Laporan	44.000.000	APBD		15 Laporan	44.000.000
2	7	1	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	kab Karimun	1 Dokumen	34.000.000	APBD		1 Dokumen	34.000.000
2	7	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah		8 Laporan	20.000.000			8 Laporan	35.000.000
2	7	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	kab Karimun	0	-	APBD		0	-
2	7	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	kab Karimun	1 Unit	3.000.000	APBD		1 Unit	3.000.000
2	7	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	kab Karimun	2 Unit	3.000.000	APBD		2 Unit	6.000.000
2	7	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	kab Karimun	2 Unit	3.000.000	APBD		2 Unit	5.000.000
2	7	1	2,07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	kab Karimun	1 Unit	2.000.000	APBD		1 Unit	4.000.000
2	7	1	2,07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	kab Karimun	1 Unit	2.000.000	APBD		1 Unit	4.000.000
2	7	1	2,07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	kab Karimun	1 Unit	2.000.000	APBD		1 Unit	4.000.000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

2	7	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainny	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainny yang Disediakan	kab Karimun	1 Unit	2.000.000	APBD		1 Unit	5.000.000
2	7	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainny	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainny yang Disediakan	kab Karimun	1 Unit	3.000.000	APBD		1 Unit	4.000.000
2	7	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Laporan	543.000.000			4 Laporan	543.000.000
2	7	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kab Karimun	2 Laporan	1.500.000	APBD		2 Laporan	1.500.000
2	7	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	kab Karimun	3 Laporan	18.500.000	APBD		3 Laporan	18.500.000
2	7	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	kab Karimun	2 Laporan	11.000.000	APBD		2 Laporan	11.000.000
2	7	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	kab Karimun	3 Laporan	512.000.000	APBD		3 Laporan	512.000.000
2	7	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		8 Laporan	47.800.000			8 Laporan	57.805.000
2	7	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	kab Karimun	2 Unit	13.800.000	APBD		2 Unit	15.000.000
2	7	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	kab Karimun	2 Unit	5.000.000	APBD		2 Unit	8.305.000
2	7	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	kab Karimun	10 Unit	5.000.000	APBD		10 Unit	6.000.000
2	7	1	2,09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	kab Karimun	1 Unit	4.000.000	APBD		1 Unit	5.000.000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

2	7	1	2,09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipeliharaa	kab Karimun	1 Unit	5.000.000	APBD		1 Unit	6.000.000
2	7	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	kab Karimun	1 Unit	5.000.000	APBD		1 Unit	6.000.000
2	7	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	kab Karimun	1 Unit	5.000.000	APBD		1 Unit	6.000.000
2	7	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	kab Karimun	1 Unit	5.000.000	APBD		1 Unit	5.500.000
TOTAL									13.360.500.000				13.430.907.000



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2022, telah disusun berdasarkan acuan dan data-data konkrit dari dokumen-dokumen anggaran yang ada, serta hasil konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait.

Dengan adanya Dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ini diharapkan penerapan dan pelaksanaa Program serta kegiatan yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun betu-betul dapat menjawab tantangan ketenagakerjaan dan Perindustrian yang ada di Kabupten Karimun,

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun ini disusun, dengan harapan semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dan pengarah pelaksanaan semua program dan kegiatan di tahun 2022 mendatang, terakhir kami menyadari bahwa dokumen ini masih ada beberapa kelemahan, untuk diharapkan dari semua unsur yang terlibat (*stakeholders*) dapat member masukan demi penyempurnaan dokumen ini, terima kasih.